RINGKASAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Judul Penelitian: PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN (SUatu Studi Tentang Produktivitas Penangan Pekara Pidana Di Polwiltabes Surabaya, Polresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur, Polresta Surabaya Utara)

Peneliti : Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.
Didik Endro PUrwoleksono, S.H., MH.
Made Darma Weda, S.H., MS.
Koesmidjo, S.H.
Drs. Psi. Duta Nurdibyanandaru, MS.

Fakultas : Hukum

Sumber dana : DIP. Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1993/1994
SK. Rektor Nomor: 3533/PT03.H/N/1993
Tanggal: 07 Mei 1993

Alur proses perkara pidana, yang menyangkut tindak pidan umum, dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan atau aparat penegak hukum mengetahui sendiri bahwa diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasar dugaan telah terjadi tindak pidana itu, aparat penegak hukum yang paling dépan atau pertama kali menangani atau memprosesnya adalah aparat kepolisian.

Dengan perkataan lain, aparat kepolisian menduduki posisi yang paling depan dalam proses peradilan pidana. Aparat kepolisianlah yang pertama kali akan menindaklanjuti segala pengaduan atau laporan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dibahas tentang berapa prosen produktivitas penanganan perkara pidana yang dapat diselsaikan oleh aparat kepolisian di Polwiltabes Surabaya, Poresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur dan Poresta Surabaya Utara. Di sisi yang dalam penelitian ini juga dibahas tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat kepolisian di atas dalam rangka penanganan terhadap perkara pidana.

Perlu diketahui bahwa perkara yang masuk dalam proses di kepolisian merupakan perkara yang dapat direkam, dideteksi oleh aparat kepolisian. Dari uraian ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah perkara atau tindak pidana yang tertera dalam statisitik kriminil aparat kepolisian, hal ini merupakan kuantitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian atau produktivitas penanganan perkara saja. Tidak menggambarkan jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam tabel di bawah ini bisa dilihat berapa prosesn produktivitas penanganan perkara oleh aparat kepolisian di jajaran Polwiltabes Surabaya.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TABEL

PROPORSI PENYELESIAN PERKARA
DI JAJARAN POLWILTABES SURABAYA
PERIODE TAHUN 1986-1990

Tahun (%) / Kepolisian	1986 %	1987 %	1988 %	1989 %	1990 %
Polwiltabes Surabaya	28	34	35	41	59
Polresta Surabaya Selatan	50	60	56	61	66
POlresta Surabaya Timur	46	49	54	47	62
Polresta Surabaya Utara	49	49	46	49	53

Kendala-kednala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana yaitu:

1. kurangnya kemampuan di kalangan aparat kepolisian dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana;
2. kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mereka;
3. kurangnya jumlah personil yang mendukung tugas-tugas;
4. kurang sadarnya warga masyarakat dalam memberikan laporan bahwa telah terjasi suatu tindak pidana;
5. terjadinya perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum (yang dalam hal ini antara aparat kepolisian dan aparat kejaksaan) tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pada hakikatnya, semua kendala tersebut di atas, bermuara pada dua hal yaitu:

1. menemukan tersangka yang belum ternagkap;
2. menemukan alat bukti yang belum dikemukan.